

Pendekatan Arsitektur Hijau pada Rusun dalam Meningkatkan Kualitas Hidup dan Keberlanjutan Permukiman Pekerja Sektor Informal di Cakung, Jakarta Timur

Iman Taqiy Nur Rafif^{1*}, Cynthia Puspitasari²

^{1,2}Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila, Jakarta

Abstrak. Pekerja sektor informal memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Di Jakarta Timur, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, banyak pekerja sektor informal yang tinggal di permukiman padat tanpa fasilitas yang memadai. Hal ini menciptakan masalah kualitas hidup yang rendah, kemacetan, serta dampak lingkungan yang buruk. Untuk mengatasi masalah ini, pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta Timur diusulkan sebagai solusi yang dapat menyediakan hunian terjangkau bagi pekerja informal. Rusunawa ini dirancang untuk tidak hanya menawarkan biaya sewa yang rendah, tetapi juga memenuhi standar kelayakan hidup dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan dasar penghuni. Pendekatan arsitektur hijau (green building) akan diterapkan untuk meningkatkan keberlanjutan, efisiensi energi, dan kualitas lingkungan. Dengan mengintegrasikan rusunawa dengan fasilitas transportasi publik, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan, serta memperbaiki kualitas udara dan lahan. Pembangunan rusunawa yang sesuai dengan prinsip arsitektur hijau ini juga dapat membantu menata kota secara lebih efisien dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup pekerja sektor informal di Jakarta Timur. penelitian menunjukkan bahwa penerapan arsitektur hijau, seperti penggunaan material ramah lingkungan, pencahayaan alami, dan efisiensi energi, mampu meningkatkan kualitas hunian secara signifikan. Selain itu, integrasi fasilitas publik dan ruang hijau turut mendukung kenyamanan penghuni dan keberlanjutan kawasan.

Kata kunci—*Rusunawa, Pekerja Informal, Perumahan Terjangkau, Desain Arsitektur*

1. PENDAHULUAN

Pekerja sektor informal memiliki peran penting dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mereka adalah individu yang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan yang tidak memiliki ikatan kerja formal, sering kali tanpa perlindungan ketenagakerjaan yang memadai. Sektor ini mencakup beragam jenis pekerjaan, mulai dari pedagang kecil, buruh harian, pengemudi ojek, hingga pekerja rumah tangga. Pekerja sektor informal berjalan melalui pengawasan oleh Organisasi Perburuhan International/*International Labour Organization* (ILO). Organisasi Perburuhan International / *International Labour Organization* (ILO) adalah organisasi yang diciptakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bergerak khusus di bidang perburuhan/ketenagakerjaan. Bertujuan untuk mengatur, merealisasikan lingkungan dan peraturan kerja yang adil serta menciptakan standar ketenagakerjaan yang layak [1]. Menurut International Labour Organization (ILO), sektor informal merupakan sektor pekerjaan yang berada di luar cakupan regulasi ketenagakerjaan dan tidak diatur oleh sistem jaminan sosial formal, yang membuat pekerja dalam sektor ini sangat rentan terhadap berbagai risiko, seperti kehilangan pekerjaan, ketidakstabilan pendapatan, hingga minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial [2].

* Corresponding author: imantaqiynurrafif@gmail.com

Indonesia memiliki persentase pekerja sektor informal yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, sekitar 60% tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal, yang menunjukkan bahwa sektor ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di negara ini. Tingginya angka pekerja sektor informal di Indonesia didorong oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal, serta tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk mencari penghidupan di sektor-sektor yang tidak terikat kontrak formal [3]. Di Indonesia, rata-rata jumlah tenaga kerja formal untuk seluruh provinsi adalah 255.847,9 orang yang berarti bahwa setiap provinsi jumlah pekerja sektor formal antara 255.847 hingga 255.848 orang. Sedangkan rata-rata jumlah pekerja sektor informal sebanyak 247.411,2 orang. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pekerja formal lebih banyak dibandingkan dengan pekerja informasi [4].

TABEL-3. Statistik Deskriptif Variabel Dependen dan Independen

Variabel	Jumlah Observasi	Rata-rata	Min	Max
<i>ft</i>	702	255.847,9	5946	1.486.174
<i>it</i>	702	247.411,2	3552	832.411
<i>pdrb</i>	702	38489,24	2026	354882
<i>ak</i>	702	517.292,9	111063	2.026.976

Gambar 1 Hasil Analisis Deskriptis Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan
Sumber: Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan

Tabel merupakan tabel deskriptif mengenai total angkatan kerja berdasarkan provinsi dan tahun. Dari keenam provinsi sebagai daerah sampel dapat diketahui bahwa total angkatan kerja tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010 hingga 2015, sedangkan jumlah terendah ada di DI Yogyakarta. Secara keseluruhan angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2014 ke 2015 yang mengalami penurunan, meskipun peningkatan dan penurunan yang terjadi relatif tidak terlalu tajam. Dilihat dari polanya, Jakarta sebagai magnet dalam perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja yang signifikan pada tahun 2011 ke 2012 [4]. Hingga sekarang DKI Jakarta masih mengalami peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya sehingga menciptakan permasalahan baru, terkhususnya bagi pekerja sektor informal yaitu keterbatasan tempat tinggal. Data terakhir pada tahun 2023, dari BPS tercatat sebanyak 1.838.096 juta orang adalah pekerja sektor informal dengan wilayah dengan jumlah pekerja sektor informal terbanyak di Jakarta adalah Jakarta Timur [5]. Di antara itu, 60% dari mereka tidak memiliki tempat tinggal.

Pekerja Formal	Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)		
	2021	2022	2023
Pekerja Formal	2.924.706	3.077.305	3.234.641
Pekerja Informal	1.812.709	1.797.797	1.838.096
Penduduk yang Bekerja	4.737.415	4.875.102	5.072.737

Gambar 2 Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2021-2023
Sumber: jakarta.bps.go.id

Permasalahan perumahan menjadi isu sentral dalam pembangunan kota modern, terutama di kawasan daerah yang padat seperti di daerah Jakarta Timur. Jakarta Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak di Provinsi DKI Jakarta, yakni mencapai 2,84 juta jiwa. Angka ini tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya [6]. Kepadatan penduduk tersebut terdiri dari beberapa lapisan masyarakat salah satunya adalah masyarakat pekerja informal yang sering kali menjadi kelompok rentan untuk memperoleh hunian yang layak. Pekerja sektor informal adalah orang yang bekerja di luar jaringan

sektor formal. Mereka sering berjuang dengan harga sewa yang tinggi, ketersediaan hunian yang terbatas, serta kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar pekerja sektor informal. Pekerja yang kompeten atau pekerja sektor informal yang biasanya, seringkali jadi tidak bisa bekerja dengan baik karena tidak adanya fasilitas yang layak. Kebutuhan dasar hidup seperti tidur dan makan, fasilitas khusus yang tersedia untuk pekerja sektor informal belum ada. Dari permasalahan itu juga menciptakan permasalahan lainnya seperti tingkat kejahatan tinggi dan kualitas Kota Jakarta Timur menjadi buruk dikarenakan ketidakterediaan dasar tersebut.

Pemerintah dan lembaga terkait sangat menyadari urgensi untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) sebagai alternatif hunian yang terjangkau dan layak. Rumah susun sewa sederhana (rusunawa) adalah bangunan perumahan bertingkat dengan fasilitas rendah/terjangkau sehingga masyarakat dengan penghasilan rendah dapat memiliki tempat tinggal dengan harga sewa terjangkau [7]. Rusunawa ini dirancang khusus sebagai alternatif hunian yang tidak hanya terjangkau dari segi biaya, tetapi juga memenuhi standar kelayakan hidup bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal. Dari pembangunannya tidak hanya mementingkan aspek pembangunan dasar bangunan rusun, tapi juga menerapkan fasilitas yang layak untuk pekerja sektor informal dapat tinggal dengan aman dan nyaman. Kepadatan penduduk lainnya yang belum teratasi jadi bisa berkurang jika beberapa lapisan masyarakat di tempatkan khusus, seperti pekerja sektor informal ini. Keberadaan mereka jadi tercatat dan terdata dengan rapih, tidak bercampur dengan kepadatan penduduk lainnya. Menurut Siswono Yudho Husodo Rumah susun merupakan cara mengatasi keterbatasan lahan di daerah perkotaan serta membuat kota menjadi lebih efisien dan teratur .

Pembangunan rusunawa di Jakarta Timur tidak hanya dapat memberikan solusi terhadap masalah perumahan, tetapi juga berperan dalam mengurangi kemacetan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Sebagai kawasan industri dengan banyak pabrik dan pekerja sektor informal, Kota Jakarta Timur menghadapi tantangan hunian layak bagi para pekerja yang sering tinggal di permukiman padat dan kurang tertata. Daerah yang padat akan masyarakat dan hunian yang tidak tersusun dengan rapih, sering kali menciptakan kualitas hidup yang tidak baik. Kepadatan dan jumlah penduduk sangat signifikan mempengaruhi kapasitas ruas jalan dan volume lalu lintas. Lalu, kualitas air daerah tersebut akan menjadi masalah jika kesadaran penduduk untuk membuang sampah pada tempatnya tidak ada. Salah satu dampak besarnya yang terakhir adalah tindak kriminal yang tinggi [8].

Perancangan rusunawa yang terintegrasi dengan fasilitas transportasi publik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemacetan. Selain itu, hunian vertikal yang ramah lingkungan dapat memperbaiki kualitas udara dan mengoptimalkan lahan, yang sering kali tertekan oleh aktivitas industri di sekitarnya. Maka dari itu, perancangan rusunawa yang dibuat harus menggunakan konsep pendekatan arsitektur bangunan hijau atau bisa disebut *Green Building*. Bangunan hijau / *Green Building* adalah sebuah gerakan khususnya bagi para praktisi di bidang arsitektur bangunan dan lingkungan binaan untuk merespon dampak dari kondisi lingkungan yang terjadi [9]. Namun, tantangan regulasi, pembiayaan, serta partisipasi masyarakat tetap menjadi hambatan dalam implementasinya. Rata-rata pekerja sektor informal adalah masyarakat miskin, mereka tidak punya biaya jika ada penyewaan rusunawa dengan tingkat harga yang tinggi. Sehingga harus di buat rancangan dengan biaya yang terjangkau dan baik untuk pekerja sektor informal. Tidak lupa dengan kualitas yang layak tersebut sudah di atur pada pasal 27 ayat 1 yang mana tempat tinggal yang layak juga harus diberikan pada seluruh masyarakat dalam KUH perdata pasal 1239 juga dijelaskan perjanjian itu harus amanah dan terpercaya dan jelas terdapat pada biaya kerugian [10].

Pembangunan rusunawa di Jakarta Timur merupakan langkah strategis untuk menyediakan hunian yang layak, terjangkau, dan ramah bagi pekerja sektor informal. Dengan jumlah pekerja informal yang tinggi dan kebutuhan perumahan yang mendesak, rusunawa dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan perumahan di kota besar seperti Jakarta. Selain menjadi hunian yang terjangkau, rusunawa

juga dirancang untuk mendukung kehidupan pekerja informal secara lebih baik, menyediakan akses fasilitas dasar yang layak, serta membantu mereka agar lebih aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya hunian yang tertata, kualitas hidup mereka dapat meningkat, dan pada saat yang sama dapat membantu mengurangi tingkat kemacetan, menata kepadatan penduduk, dan memperbaiki kualitas lingkungan di Jakarta Timur. Selain itu, rusunawa yang terintegrasi dengan transportasi publik dan berbasis konsep bangunan hijau dapat membantu mendukung pembangunan kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini berupa pencarian ide perancangan yang berfokus pada kebutuhan hunian layak bagi pekerja sektor informal di Jatinegara, Jakarta Timur. Kurangnya akses terhadap tempat tinggal yang memadai menjadi permasalahan utama yang mendorong gagasan ini. Solusi yang diusulkan tidak hanya bertujuan untuk menyediakan hunian, tetapi juga mengintegrasikan konsep arsitektur hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitar. Melalui observasi dan analisis, identifikasi masalah utama, seperti keterbatasan hunian layak dan kurangnya fasilitas pada rumah susun yang ada, menjadi landasan untuk merumuskan solusi desain yang sesuai.

Dengan tujuan merancang rumah susun vertikal, penelitian ini berfokus pada penciptaan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga ramah lingkungan. Elemen-elemen arsitektur hijau diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang sehat, efisien dalam penggunaan energi dan air, serta meningkatkan kesejahteraan penghuni. Pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui observasi langsung ke lokasi dan wawancara dengan masyarakat setempat untuk memahami kondisi lingkungan yang ada. Selain itu, studi literatur terkait dengan konsep arsitektur hijau dan kasus bangunan serupa juga digunakan untuk mendukung perancangan.

Setelah data terkumpul, analisis menyeluruh dilakukan terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan perancangan, seperti tapak, bangunan, dan struktur. Hasil analisis ini akan membentuk konsep desain yang efektif, fungsional, dan sesuai dengan prinsip arsitektur hijau. Dengan mempertimbangkan semua faktor yang teridentifikasi, desain akhir akan memastikan setiap unit hunian tidak hanya memaksimalkan penggunaan ruang tetapi juga menjaga efisiensi energi, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan perancangan rumah susun vertikal yang layak huni dan mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN




Hasil survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa banyak rusunawa (rumah susun sederhana sewa) di Cakung, Jakarta Timur, yang masih belum memenuhi standar untuk mendukung kualitas permukiman yang layak bagi pekerja sektor informal. Meskipun rusunawa ini dirancang untuk memberikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, banyak unit yang tidak menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung kualitas hidup penghuninya, terutama dalam aspek kesehatan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, lingkungan sekitar rusunawa juga tidak mendukung aktivitas sosial dan kegiatan sehari-hari pekerja sektor informal, yang mengharuskan mereka untuk bekerja dalam kondisi yang sering kali kurang ideal.

Survei juga menunjukkan bahwa banyak pekerja sektor informal yang tinggal di rusunawa tidak mendapatkan fasilitas dasar seperti area bermain anak, ruang terbuka hijau, atau akses ke fasilitas umum yang mendukung perkembangan sosial dan psikologis mereka. Ini menjadi masalah besar, mengingat pentingnya aspek fisik dan sosial dalam mendukung kualitas hidup pekerja sektor informal dan keluarga mereka. Penerapan prinsip arsitektur hijau yang mengutamakan keberlanjutan, efisiensi energi, dan ramah lingkungan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas permukiman di kawasan rusunawa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun rusunawa menyediakan hunian bagi pekerja sektor informal, kualitas fasilitas yang ada masih perlu banyak perbaikan. Pendekatan arsitektur hijau, yang mengintegrasikan elemen-elemen alami dan ramah lingkungan, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni rusunawa. Konsep arsitektur hijau ini dapat memberikan keuntungan jangka panjang, baik dalam segi efisiensi energi, pengelolaan limbah, maupun keberlanjutan lingkungan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan penghuni rusunawa.

Pemilihan lahan untuk perancangan rusunawa di Cakung juga menjadi faktor yang sangat penting. Lahan yang strategis dan sesuai dengan prinsip arsitektur hijau akan mendukung terciptanya lingkungan yang nyaman dan sehat bagi penghuni. Beberapa kriteria lahan yang memenuhi syarat untuk penerapan arsitektur hijau di antaranya adalah lokasi yang dekat dengan akses transportasi umum, minim polusi, serta memiliki potensi untuk mengoptimalkan ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien.

Tabel 1 Alternatif Tapak

Data	Alternatif Tapak 1	Alternatif Tapak 2	Alternatif Tapak 3
Gambar Tapak			
Lokasi	Jl. Gebang Mutiara, RT.5/RW.13, East Cakung, East Jakarta City, Jakarta	Jl. Pintu 2 Raya, RT.11/RW.2, Pinang Ranti, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Jl. Bina Marga No.88, RT.3/RW.6, Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13840
Luas Tapak	3 Hectar	1 Hectar	2 Hectar
Peruntukan Tapak	Rumah Susun Khusus, Rumah Susun Komersial, Rumah Susun Umum	Rumah Susun Khusus, Rumah Susun Komersial, Rumah Susun Umum	Rumah Susun Khusus, Rumah Susun Komersial, Rumah Susun Umum
Lingkungan Sekitar Tapak	Majid, Pusat Perbelanjaan, Permukiman, Sekolah	Masjid, Permukiman, Sekolah,	Masjid, Permukiman, Sekolah, puskesmas, Gereja
KDB	60%	60%	60%
KDH	20%	20%	20%
KLB	1,6	1,6	1,6
GSB	6 M	7 M	5 M

Sumber Tabel : Analisis Pribadi

Pada pemilihan ini, terdapat sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan untuk mendukung, meminimalkan gangguan, dan memastikan efektivitas penggunaan tapak tersebut. Penentuan lokasi tapak yang akan dipilih membutuhkan beberapa kriteria yang perlu dianalisis. Analisis tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2 Penentuan Lokasi Tapak

Kriteria	Alternatif Tapak 1	Nilai	Alternatif Tapak 2	Nilai	Alternatif Tapak 3	Nilai
Lokasi	Berada di Kawasan	5	Berada di Kawasan	5	Berada di Kawasan	5
Peruntukan Lahan	Zona perumahan	4	Zona perumahan	4	Zona perumahan	4
Luas Tapak	Mencukupi Persyaratan	5	Mencukupi Persyaratan	5	Mencukupi Persyaratan	5
Kondisi Lahan	Lahan Kosong	5	Lahan Kosong	5	Lahan Kosong	5
Klimatologi	Cuaca Panas	4	Cuaca Panas	4	Cuaca Panas	4
Kontur Tapak	Datar	5	Datar	5	Datar	5
Kebisingan Tapak	Lalu lintas sedang	5	Lalu lintas cukup tinggi	4	Lalu lintas cukup tinggi	4
Visibilitas Ke Tapak	Dapat dilihat langsung dari jalan Gebang Mutiara	3	Dapat dilihat langsung dari jalan H.J Sultan Mahri	4	Dapat dilihat langsung dari jalan Alamanda	5
Bangunan Pendukung Sekitar Tapak	Majid, Pusat Perbelanjaan, Permukiman, Sekolah	4	Masjid, Permukiman, Sekolah,	3	Masjid, Permukiman, Sekolah, puskesmas	5
Total Nilai	40		39		42	
Peringkat	2		3		1	

Pemilihan lokasi untuk perancangan Rumah Susun untuk Pekerja Sektor Informal di Cakung, Jakarta Timur ini didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jakarta. Sesuai dengan RTRW, kawasan yang disarankan untuk proyek rumah susun ini termasuk ke dalam area dengan fungsi permukiman, perdagangan/jasa, serta fasilitas sosial. Dari kriteria tersebut, beberapa alternatif lokasi diidentifikasi berdasarkan peruntukan lahan yang tersedia. Selain itu, proses pemilihan lokasi mempertimbangkan sejumlah kriteria yang telah dibahas pada tinjauan sebelumnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Jakarta Timur (2023), Kecamatan Cakung memiliki populasi sebesar 755.226 jiwa, dengan pembagian penduduk laki-laki sebanyak 381.234 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 373.992 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 41,34 km², kepadatan penduduk Cakung mencapai 18.277 jiwa per km². Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau, terutama bagi pekerja sektor informal yang membutuhkan akses ke tempat tinggal di dekat pusat kegiatan ekonominya.

Kepadatan tertinggi berada di Kelurahan Penggilingan, yang mencapai 22.300 jiwa per km², sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kelurahan Ujung Menteng, dengan sekitar 15.100 jiwa per km².

Kepadatan ini menunjukkan bahwa pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun dapat menjadi solusi untuk menyediakan hunian yang terjangkau dan nyaman bagi masyarakat di kawasan ini.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil survei dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa banyak rusunawa di Cakung, Jakarta Timur, yang masih belum memenuhi standar untuk mendukung kualitas hidup yang layak bagi pekerja sektor informal. Meskipun rusunawa ini bertujuan untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, banyak fasilitas yang ada kurang memadai, terutama dalam mendukung kebutuhan dasar penghuni, seperti fasilitas kesehatan, kenyamanan, dan pengembangan sosial anak. Selain itu, lingkungan sekitar rusunawa yang terbatas juga tidak mendukung aktivitas sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja sektor informal.

Penerapan arsitektur hijau dengan prinsip keberlanjutan, efisiensi energi, dan ramah lingkungan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permukiman ini. Selain itu, pemilihan lahan yang tepat dan strategis juga merupakan faktor penting untuk mendukung terciptanya lingkungan yang nyaman dan sehat bagi penghuni.

Rekomendasi:

1. **Penerapan Arsitektur Hijau:** Disarankan untuk menerapkan konsep arsitektur hijau pada perancangan rumah susun untuk pekerja sektor informal, yang mengutamakan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, serta keberlanjutan lingkungan. Hal ini akan mendukung kualitas hidup penghuni jangka panjang, baik dalam segi fisik maupun sosial.
2. **Peningkatan Fasilitas Sosial dan Kesehatan:** Diperlukan penambahan fasilitas dasar yang mendukung tumbuh kembang sosial dan psikologis penghuni, seperti area bermain anak, ruang terbuka hijau, dan akses ke fasilitas kesehatan serta pendidikan. Fasilitas-fasilitas ini akan mendukung peningkatan kualitas hidup penghuni dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.
3. **Pemilihan Lokasi yang Tepat:** Pemilihan lahan yang memenuhi kriteria untuk penerapan arsitektur hijau, seperti aksesibilitas ke transportasi umum, minim polusi, dan ketersediaan ruang terbuka hijau, perlu diperhatikan. Dari tiga alternatif lokasi yang dianalisis, Alternatif Tapak 3 menempati peringkat tertinggi, dengan total nilai 42, sehingga disarankan untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah susun.
4. **Peningkatan Keterlibatan Masyarakat:** Sebelum dan selama proses pembangunan, perlu dilakukan keterlibatan masyarakat sekitar dalam merancang dan mengelola ruang publik di sekitar rusunawa. Hal ini dapat memperkuat aspek sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, serta menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), “BAB III ILO (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DENGAN FOKUS KETENAGAKERJAAN,” Dec. 2018, Accessed: Oct. 30, 2024. [Online]. Available: <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28589/6.%20BAB%20%20I.pdf?sequence=5>
- [2] International Labour Organization, “Statistics on the informal economy,” <https://ilostat.ilo.org/topics/informality/>.
- [3] Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, “keadaan-pekerja-di-indonesia-agustus-2021,” Aug. 2021, Accessed: Oct. 30, 2024. [Online].
- [4] K. Ekonomi and B. Teguh Gunawan, “PENGARUH PEMILIHAN KEPALA DAERAH TERHADAP PASAR TENAGA KERJA: ANALISIS SEKTOR FORMAL DAN INFORMAL LEVEL KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA,” 2018. [Online]. Available: <http://fiskal.depkeu.go.id/ejournal>
- [5] Badan Pusat Statistik Provinsi Dki Jakarta, “Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2021-2023,” <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA5MCMY/jumlah-pekerja-formal-dan-informal-di-provinsi-dki-jakarta.html>.
- [6] Admin, “Jakarta Timur, Wilayah dengan Penduduk Terbanyak di DKI,” <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9b4aa8adf32ef22/jakarta-timur-wilayah-dengan-penduduk-terbanyak-di-dki#:~:text=Jakarta%20Timur%20merupakan%20wilayah%20dengan%20jumlah%20penduduk%20paling,jiwa>.
- [7] M. Ridho Hermawan and Z. Fuady, “Penerapan Tema Tanggap Iklim Melalui Pendekatan Arsitektur Tropis Pada Perancangan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kota Banda Aceh.”
- [8] ... Preddy, P. Marpaung, I. Pebrian, and W. Putri, “Penerapan Data Mining Untuk Pengelompokan Kepadatan Penduduk Kabupaten Deli Serdang Menggunakan Algoritma K-Means,” *Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi (JIKOMSI)*, vol. 6, no. 2, pp. 64–70, 2023.
- [9] “326040685”.
- [10] V. C. E. Palar and M. F. Mekka, “Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 35–48, Jan. 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i1.2091.